

BAB 1

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Pegawai Negeri Sipil (PNS) merupakan salah satu unsur penting dalam pengelolaan pemerintahan di Indonesia. Segala hal tentang pns di Indonesia saat ini diatur pada undang-undang republik Indonesia No. 5 tahun 2014. PNS merupakan unsur aparatur negara yang ditujukan untuk melayani dan membantu masyarakat dengan ramah, adil dan juga merata, selain itu pns juga bertanggung jawab untuk menjaga persatuan dan kesatuan bangsa dengan penuh kesetiaan kepada Pancasila dan UUD 1945. Sesuai dengan peraturan pemerintah nomer 53 tahun 2010 mengenai disiplin kerja pns yang isinya yaitu menuntut kesanggupan bagi setiap pegawai negeri sipil untuk dapat berperilaku disiplin dalam segala hal yang menaati kewajiban dan menghindari larangan yang ditentukan oleh peraturan perundang-undangan. Berdasarkan hal tersebut seharusnya PNS melaksanakan perintah undang-undang dengan bersikap disiplin dan bekerja dengan rajin. Hal ini agar dapat mencapai hasil yang optimal bagi masyarakat, pemerintah, serta pembangunan untuk bangsa dan negara.

Dilansir dari data terakhir Badan Pusat Statistik (BPS) jumlah pns di Indonesia pada tahun 2016 berjumlah 4.374.349 orang dengan jumlah laki-laki 2.217.493 orang dan jumlah perempuan 2.156.856 orang yang tersebar di 34 kementerian yang ada pada kabinet Presiden Jokowi-JK (Badan Pusat Statistik 2016). Namun, kenyataannya saat ini di Indonesia dengan jumlah pns yang cukup banyak tersebut, kapasitas yang diberikan masih belum sesuai dengan harapan. Pandangan yang meluas dan berkembang di kalangan masyarakat telah memberikan kesan negatif kepada pns. Pandangan negatif yang berkembang di masyarakat mengenai PNS beberapa diantaranya yaitu, pelayanan yang kurang baik, perbedaan perlakuan (ketidakadilan) dalam memberikan layanan, kinerja dan lain sebagainya. Hal yang paling sering menjadi sorotan media maupun masyarakat adalah mengenai kinerja PNS.

Berikut adalah hasil penilaian kinerja PNS yang dilakukan oleh Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi selama beberapa tahun terakhir ini. Dilansir dari berita pada laman asn CPNS.com (2015), kinerja PNS berdasarkan hasil penilaian Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP) dari 500 kabupaten/kota di Indonesia tidak ada satupun kabupaten/kota yang memperoleh predikat skor A, hanya ada 11 kabupaten/kota yang memperoleh predikat skor B, dan kabupaten/kota lainnya mendapatkan nilai di bawah predikat skor B. Pada tahun 2017, Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi mengatakan masih banyak PNS yang mendapatkan nilai Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP) C yang berarti kinerjanya masih jauh dari target pemerintah (Sugianto, 2017). Kemudian, pada 6 Februari 2019, Syarifuddin Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi menyerahkan rapor Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP) 2018 bagi 151 pemerintah daerah di wilayah II, dari 151 laporan 7 pemerintah daerah berhasil memperoleh predikat A, 21 pemerintah daerah dengan predikat BB, 70 pemerintah daerah berpredikat B, 49 pemerintah daerah dengan predikat CC, dan 19 pemerintah daerah lainnya masih memperoleh predikat C (Tribunnews.com, 2019).

Pencapaian ini masih belum dapat dikatakan baik karena jumlah daerah yang memperoleh predikat A masih sangat sedikit dan daerah yang memperoleh predikat C masih banyak. Hal tersebut menjelaskan bahwa kinerja PNS masih belum dapat memenuhi harapan pemerintah. Dalam membantu kinerja pegawai negeri sipil untuk menjalankan fungsi dari sebuah instansi khususnya wilayah Jawa Timur yaitu dengan pengangkatan Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK) atau non PNS yang salah satunya adalah dalam hal pelayanan publik yang merupakan fungsi dari pemerintah itu sendiri. Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK) memegang peranan penting demi terselenggaranya pelayanan publik yang maksimal bagi masyarakat, sebab pelayanan publik sangat berhubungan langsung dengan masyarakat itu sendiri, sehingga proses pelayanan publik harus bisa memuaskan masyarakat. Namun pada kenyataannya Ada banyak faktor yang dapat mempengaruhi kinerja PNS dan non PNS, salah satu diantaranya

adalah masih banyaknya pns dan non pns yang melakukan perilaku kerja kontraproduktif yang disebut juga sebagai *Counterproductive Work Behavior* (CWB).

Chang dan Smithikrai (2010) mendefinisikan perilaku kerja kontraproduktif atau *Counterproductive Work Behavior* (CWB) sebagai perilaku sukarela atau disengaja yang bertentangan dengan kepentingan organisasi. Perilaku kerja kontraproduktif seringkali muncul dalam tiap organisasi baik swasta maupun organisasi pemerintah. Dengan demikian, perilaku kerja kontraproduktif atau *Counterproductive Work Behavior* (CWB) adalah segala macam bentuk perilaku yang dilakukan oleh individu dengan sengaja maupun tidak sengaja yang bertentangan, membahayakan organisasi dan individu lain, serta menghambat organisasi untuk mencapai tujuan.

Berdasarkan latar belakang di atas, maka dipilihlah judul tugas akhir yaitu **“Pemetaan Persepsi Karyawan Berstatus PNS dan Non PNS terhadap *Counterproductive Work Behavior* (CWB) di Instansi Pemerintah Wilayah Jawa Timur”**.

1.2 Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang dan permasalahan yang ada pada instansi pemerintah yaitu tentang *Counterproductive Work Behavior* maka rumusan masalah yang dapat dikemukakan adalah **“Bagaimana pemetaan persepsi karyawan berstatus PNS dan non-PNS terhadap *Counterproductive Work Behavior* (CWB) di Instansi Pemerintah Wilayah Jawa Timur?”**

1.3 Tujuan Penulisan

Tujuan penulisan tugas akhir ini adalah untuk mengetahui pemetaan persepsi karyawan berstatus PNS dan non-PNS terhadap *Counterproductive Work Behavior* (CWB) di Instansi Pemerintah Wilayah Jawa Timur.

1.4 Manfaat Penulisan

Manfaat penulisan tugas akhir bagi beberapa pihak adalah sebagai berikut:

1. Bagi Mahasiswa
 - (a). dapat menambah pengetahuan dan memperkaya khasanah pustaka bagi ilmu–ilmu sosial terutama ilmu sumber daya manusia.
 - (b). sebagai acuan sarana berlatih dalam meningkatkan kemampuan menulis saat pengamatan dan pengungkapan pengembangan ide secara ilmiah terhadap masalah yang ada.
2. Bagi Universitas
 - (a). sebagai bahan bacaan dan kajian ilmu khususnya bagi mahasiswa administrasi perkantoran Universitas Airlangga
 - (b). Membantu mahasiswa dalam menyelesaikan tugas akhir
3. Bagi Instansi Pemerintah
 - (a). menjadi masukan dan sarana informasi bagi Instansi Pemerintah
 - (b). sebagai bahan pertimbangan manajemen pada Instansi Pemerintah untuk memberikan pemahaman tentang perlunya kontrol diri sebagai sarana untuk mencegah terjadinya perilaku kerja kontraproduktif.
 - (c). Menjalin hubungan baik dengan Fakultas Vokasi Universitas Airlangga.
4. Bagi pegawai, dapat memperoleh informasi mengenai perilaku kerja kontra produktif atau *Counterproductive Work Behavior* (CWB) yang mungkin terjadi di lingkungan kerja sehingga dapat menghindari perilaku tersebut, agar pegawai saling mengingatkan rekan kerja untuk menghindari perilaku kerja kontraproduktif
5. Bagi pembaca sebagai referensi bagi peneliti lain di permasalahan yang sejenis.

1.5 Metode Pengumpulan Data

Penyusunan tugas akhir ini menggunakan metode penelitian kuantitatif untuk pengukuran terhadap suatu data yang diperoleh melalui kuesioner yang disebarkan ke responden sasaran dan kemudian membuat kesimpulan. Menurut Sugiyono (2014:8) penelitian kuantitatif adalah Metode penelitian yang berlandaskan pada filsafat positivisme, digunakan untuk meneliti pada populasi

atau sampel tertentu, pengumpulan data menggunakan instrument penelitian, analisis data bersifat kuantitatif atau statistik, dengan tujuan untuk menguji hipotesis yang telah ditetapkan. Metode pengumpulan data yang dilakukan oleh penulis adalah sebagai berikut:

1. Studi Lapangan (*Field Research*)

Studi lapangan adalah penelitian secara langsung pada perusahaan/instansi yang bersangkutan dengan maksud memperoleh data dan informasi yang diperlukan dengan cara :

a. Pengamatan (*Observation*) Menurut Sutabri (2012:90), pengamatan langsung atau observasi merupakan teknik pengumpulan data langsung melihat kegiatan yang dilakukan *user*. Observasi dilakukan untuk menambah dan melengkapi data dari pengumpulan data melalui dokumentasi. Teknik ini dilakukan dengan cara melihat dan mengamati secara langsung pegawai yang ada di Dinas Pendidikan Provinsi Jawa Timur pada saat magang.

b. Kuesioner (*Questionnaire*)

Menurut Sugiyono (2014:199) Kuesioner merupakan teknik pengumpulan data yang dilakukan dengan cara memberikan seperangkat pertanyaan atau pernyataan tertulis kepada responden untuk dijawabnya. Metode kuesioner ini dilakukan melalui link *google form* yang berisi pertanyaan-pertanyaan yang diberikan kepada responden sasaran lalu di isi oleh responden yang berstatus pns dan non pns.

c. Dokumentasi (*Documentation*)

Menurut Werang (2015:122). Metode ini digunakan untuk mengumpulkan data tentang peristiwa atau kejadian masa lalu yang telah didokumentasikan. Dokumentasi ini digunakan untuk mengumpulkan data berupa peraturan pemerintah terkait pns dan non pns serta data responden yang di isi melalui *google form* dan data-data lain yang diperlukan.

2. Studi Kepustakaan (*Library Research*)

Menurut Werang (2015:39) Kajian pustaka sering dikenal dengan istilah “studi kepustakaan” atau “kajian literatur”. Kajian pustaka dimaksudkan merupakan usaha sadar yang dilakukan oleh seseorang atau suatu kelompok orang untuk menemukan teori-teori dan hasil penulisan sebelumnya yang relevan yang akan digunakan sebagai landasan acuan bagi penulisan yang akan dilakukan. Metode ini juga dilakukan dengan membaca dari buku pustaka, jurnal, undang-undang tentang pokok-pokok kepegawaian, peraturan pemerintah dan sumber yang lain baik melalui tulisan tercetak maupun format digital yang terpercaya sebagai referensi dalam penelitian tugas akhir yang berhubungan dengan topik yang dibahas yaitu tentang *Counterproductive Work Behavior* atau perilaku kerja kontra produktif yang sesuai dengan pembahasan

3. *Purposive sampling*

Menurut sugiyono (2016:85) *purposive sampling* merupakan Teknik pengambilan sampel sumber data dengan pertimbangan tertentu. *purposive sampling* ini digunakan untuk penetapan pertimbangan-pertimbangan atau kriteria-kriteria tertentu yang harus dipenuhi oleh sampel atau responden yang digunakan dalam penulisan ini.

1.6 Sistematika Penulisan Tugas Akhir

Dalam penyusunan tugas akhir ini, pembahasan diklasifikasikan ke dalam empat bab yaitu:

BAB 1 PENDAHULUAN

Dalam bab ini menjelaskan secara singkat latar belakang, rumusan masalah, tujuan penulisan, Manfaat penulisan, Metode pengumpulan data, Sistematika penulisan.

BAB 2 TINJAUAN PUSTAKA

Bab ini menguraikan tentang teori – teori *Counterproductive Work Behavior* (CWB) dari penelitian sebelumnya, dari buku dan peraturan-

peraturan PNS dan non PNS, serta dapat dijadikan pedoman yang relevan dalam sebuah penulisan Tugas Akhir.

BAB 3 HASIL DAN PEMBAHASAN

Bab ini berisi tentang hasil dan pembahasan penelitian serta penjabaran dari Rumusan Masalah yang telah tertulis di Bab 1.

BAB 4 KESIMPULAN DAN SARAN

Bab ini merupakan bab terakhir dalam penulisan tugas akhir yang di dalamnya terdapat kesimpulan dari semua pembahasan serta saran yang di sampaikan penulis bagi pihak yang terlibat.